

**ANALISIS BELANJA BIDANG PENDIDIKAN DAN  
KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU**

Diajukan Oleh

YUNI SYARIFANTI BANDA

4518011007



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : "Analisis Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku"

Nama Mahasiswa : Yuni Syarifanti Banda

Stambuk/NIM : 4518011007

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Tempat Penelitian : Kabupaten Buru Provinsi Maluku



Dr. Thamrin Abduh, SE, M.Si

Rafiuddin, SE, M.Si

**Mengetahui dan Mengesahkan:**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi**

**Ketua Program Studi**

**Universitas Bosowa**

**Ekonomi Pembangunan**

Dr. Hj. Hernawati Abu Bakar SE.,MM

Rafiuddin, SE, M.Si

Tanggal Pengesahan

### PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yuni Syarifanti Banda

Nim : 4518011007

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 15 juli 2022

bersangkutan  
  
METERAI  
TEMPEL  
82B4AJX968014561

**Yuni Syarifanti Banda**

**4518011007**

**ANALISIS BELANJA BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BURU PROVINSI  
MALUKU**

**Oleh:**

**Yuni Syarifanti Banda**

**Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

**Yuni Syarifanti Banda.** 2022. Analisis Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku, (dibimbing oleh **Dr. Thamrin Abduh, SE, M.Si** dan **Rafiuddin, SE., M.Si**) Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data yaitu Penelitian Lapangan melalui wawancara, dokumentasi, dan *Library Reseach*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa data dokumen atau tabel-tabel mengenai realisasi Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang di peroleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dan untuk data Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Data dianalisis regresi linear berganda dengan statistik IBM SPSS Versi 25.0

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Belanja Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, variabel Belanja Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

**Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Bidang Pendidikan, Belanja Bidang Kesehatan**

# **EDUCATION AND HEALTH SHOPPING ANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN BURU DISTRICT, MALUKU PROVINCE**

**By:**

**Yuni Syarifanti Banda**

**Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business**

**Bosowa University**

## **ABSTRACT**

**Yuni Syarifanti Banda.** 2022. Analysis of Education and Health Expenditures on the Human Development Index in Buru Regency, Maluku Province, (supervised by Dr. Thamrin Abduh, SE, M.Si and Rafiuddin, SE., M.Si) Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business Bosowa University.

This study aims to analyze and determine the effect of spending on education and health on the Human Development Index in Buru Regency, Maluku Province. In this study using a quantitative approach with data collection methods, namely Field Research through interviews, documentation, and Library Research. The data sources used in this study are secondary data in the form of document data or tables regarding the realization of Expenditures for Education and Health obtained by the Regional Development Planning, Research and Development Agency (BAPPEDA) and for the Human Development Index data obtained from the Central Statistics Agency Badan Pusat Statistik (BPS) Buru Regency, Maluku Province. Data were analyzed by multiple linear regression with IBM SPSS Statistics Version 25.0

The results of this study indicate that the Education Sector Expenditure variable has a positive and insignificant effect on the Human Development Index, the Health Sector Expenditure variable has a positive and significant impact on the Human Development Index and the Education and Health Sector Expenditure has a significant effect on the Human Development Index in Buru Regency, Maluku Province.

**Keywords: Human Development Index, Education Sector Expenditure, Health Sector Expenditure**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah ribbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran atas penelitian yang akan dijadikan pertimbangan pada penelitian selanjutnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak support dan bantuan serta doa dari kedua orang tua Bapak Drs. Hamid Banda M.Mpd dan Ibu Darmawati Ambotan S.Mn serta beberapa orang penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ir.Batara Surya. S.T.,M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. HJ. Herminawaty Abu Bakar, SE.,M.M.,CSBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Indrayani Nur. S.Pd SE.,M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Rafiuddin SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar

dan sebagai dosen pembimbing dua yang senantiasa mengarahkan, memberikan saran dan perbaikan dengan sabra sehingga proses penelitian dan penyusunan skripsi dapat selesai dengan baik.

5. Kepada Bapak Dr. Thamrin Abduh, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing satu atas waktu untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan Pendidikan kepada penulis serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Segenap staf dan karyawan di Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang juga banyak membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Ekonomi pembangunan 18 dan seperjuangan Angkatan 18 yang membantu dan memberi motivasi agar terselesaikannya karya ilmiah ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar,15 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi .....	7
2.1.2 Konsep Pembangunan Manusia.....	8
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia .....	9
2.1.4 Dimensi Indeks Pembangunan Manusia.....	11
2.1.4.1 Umur Panjang Hidup dan Hidup Sehat.....	11
2.1.4.2 Indeks Pengetahuan.....	12
2.1.4.3 Standar Hidup layak.....	12
2.1.5 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia .....	13
2.2 Pengeluaran Pemerintah .....	15
2.2.1 Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan .....	19
2.2.2 Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan.....	23
2.3 Kerangka Pikir.....	26
2.4 Hipotesis.....	27

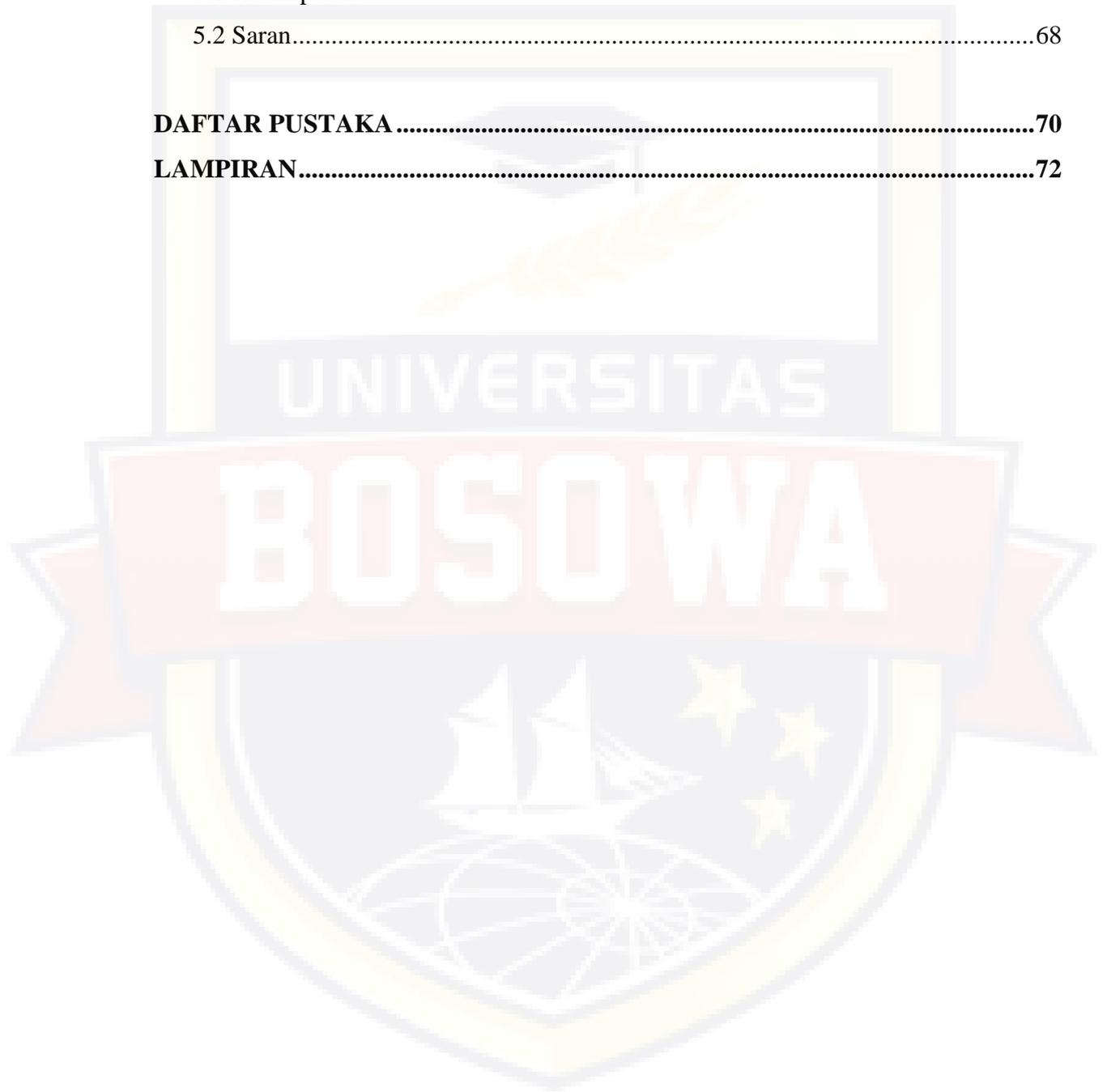
## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	28
3.2.1 Penelitian Lapangan .....	28
3.2.2 Penelitian Kepustakaan .....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	29
3.3.1 Jenis Data .....	29
3.3.2 Sumber Data .....	30
3.4 Metode Analisis .....	30
3.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda .....	30
3.4.2 Uji Hipotesis .....	33
3.5 Defenisi Operasional .....	35

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian .....	36
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buru .....	36
4.1.2 Gambaran Umum Badan Pusat Statistik .....	38
4.1.3 Visi Dan Misi Bdan Pusat Statistik .....	38
4.1.3.1 Visi Badan Pusat Statistik .....	38
4.1.3.2 Misi Badan Pusat Statistik .....	39
4.1.4 Sejarah Badan Pusat Statistik .....	39
4.1.5 Tugas dan Fungsi Badan Pusat Statistik .....	41
4.1.5.1 Tugas Badan Pusat Statistik .....	41
4.1.5.2 Fungsi Badan Pusat Statistik .....	41
4.1.6 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik .....	43
4.1.7 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian .....	44
4.2 Deskriptif Data .....	47
4.3 Hasil Analisis Data .....	49
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	49
4.3.2 Uji Asumsi Klasik .....	50

4.4 Pembahasan Penelitian.....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

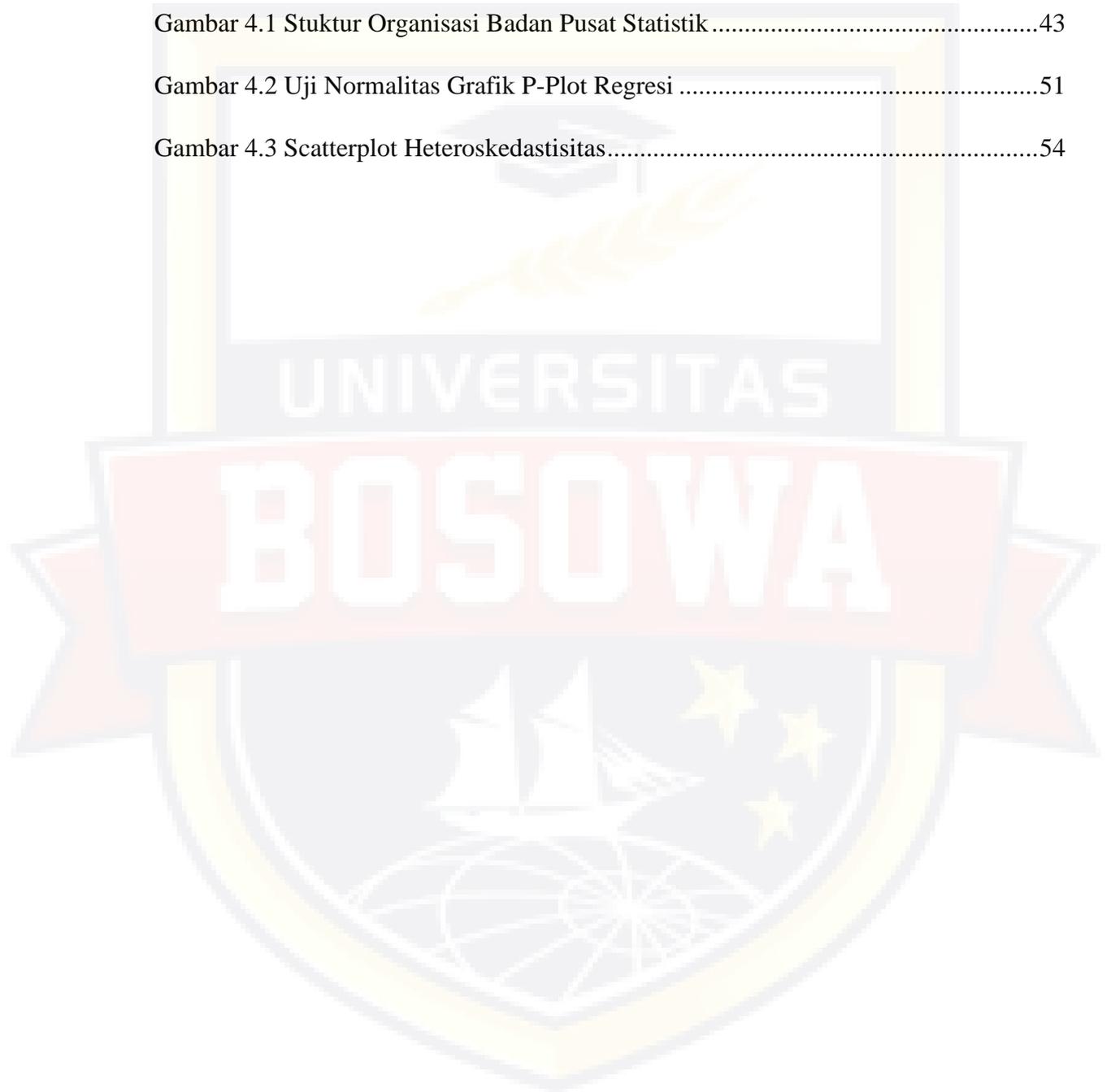


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Dalam Persen).....	1
Tabel 1.2 Realisasi Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Buru Provinsi Maluku dan Pendapatan Daerah (Dalam Miliar) .....	4
Tabel 2.1 Penentuan Nilai Maksimum dan Minimum .....	13
Tabel 2.2 Diagram Perhitungan IPM .....	14
Tabel 4.1 Data Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Buru.....	47
Tabel 4.2 Data Belanja Pendidikan dan Kesehatan Di Kabupaten Buru .....	48
Tabel 4.3 Data Belanja Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan IPM .....	49
Tabel 4.4 Hasil Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.5 Uji Normalitas <i>Kolmogrov-smirnov Test</i> .....	52
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas .....	53
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi.....	55
Tabel 4.8 Uji <i>Run-Test</i> .....	55
Tabel 4.9 Uji Regresi Linear Berganda.....	57
Tabel 4.10 Uji Parsial.....	59
Tabel 4.11 Uji Simultan .....	61
Tabel 4.12 Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Badan Pusat Statistik.....	43
Gambar 4.2 Uji Normalitas Grafik P-Plot Regresi .....	51
Gambar 4.3 Scatterplot Heteroskedastisitas.....	54



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan secara harfiah digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bangsa yang salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terlaksananya pembangunan di daerah tercermin dari terwujudnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut suparmoko (2000) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang di harapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja daerah yang secara efektif dapat berperan dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikenal sebagai salah satu alat ukur untuk melihat kondisi sumber daya manusia pada suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Indeks* (HDI) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam

tingkat kesejahteraan, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan lingkungan. Oleh sebab itu fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya (Badan Pusat Statistik).

**TABEL 1.1**  
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BURU**  
**PROVINSI MALUKU**

Tahun	IPM Kabupaten Buru Provinsi Maluku
2015	65,75
2016	66,63
2017	67,61
2018	68,25
2019	68,91
2020	68,95

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru mengalami peningkatan setiap tahun. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku pada tahun 2015-2020 memiliki nilai yaitu 65,75, 66,63, 67,61, 68,25, 68,91 dan 68,95 berarti Indeks Pembangunan Manusia tergolong kategori sedang. Untuk melihat capaian Indeks Pembangunan Manusia antar wilayah dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1.  $IPM < 60$  tergolong kategori rendah
2.  $60 \leq IPM < 70$  tergolong kategori sedang

3.  $70 \leq \text{IPM} < 80$  tergolong kategori tinggi
4.  $\text{IPM} \geq 80$  tergolong kategori sangat tinggi

Dengan adanya kategori ini dapat diukur sejauhmana tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup dan dibangun 3 dimensi dasar yaitu: kesehatan (*health*), Pendidikan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesuksesan dalam Pendidikan bergantung pada kecukupan kesehatan. Di samping itu kesehatan juga merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan Pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan, sehingga diperlukan peran pemerintah dengan pengalokasian belanja untuk peningkatan pembangunan melalui peningkatan Pendidikan dan kesehatan.

**TABEL 1.2**  
**REALISASI BELANJA BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**  
**KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU**

Tahun	Bidang pendidikan (Rp)	Bidang Kesehatan (Rp)
2015	32.603.424.408	11.010.579.408
2016	21.631.458.051	13.254.454.888
2017	20.025.940.377	52.352.953.350
2018	24.823.548.903	78.919.432.144
2019	30.722.247.491	43.331.433.758
2020	54.515.407.300	81.712.373.200

*Sumber: dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan BPS Tahun 2021*

Menurut tabel 1.2 perkembangan belanja bidang Pendidikan pada tahun 2020 terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp. 54.515.407.300 pada tahun 2017 mengalami penurunan anggaran yaitu Rp. 20.025.940.377.

Perkembangan Belanja Bidang Kesehatan pada tahun 2020 terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp. 81.712.373.200, pada tahun 2019 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.43.331.433.758. Belanja Bidang Kesehatan mengalami peningkatan anggaran yang paling besar pada tahun 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Belanja Bidang Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku?
2. Apakah Belanja Bidang Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Provinsi Maluku?
3. Apakah Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Provinsi Maluku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pendalaman dan pemahaman materi yang didapatkan diperkuliahan dan mengaplikasikannya pada penelitian ini.

## 2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan bahan kajian terhadap perekonomian Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

## 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam sektor pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Kenaikan PDB tersebut lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Singkatnya, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapat masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapat, tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi diluar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

Pembangunan ekonomi dikatakan sebagai sebuah proses kenaikan pada pendapatan total serta pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi ini mempertimbangkan pada pertambahan penduduk pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi di suatu negara da juga pada pemerataan pendapatan.

Pembangunan ekonomi didukung dengan penggunaan teknologi, penanaman modal, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, serta kemampuan organisasi. Indonesia pun tentunya sudah menentukan tujuan dari pembangunan

ekonomi pada jangka panjang serta pendek. Seluruhnya tentunya selaras pada dasar negara, konstitusi, serta undang-undang.

Menurut Sadono Sukirno (1996: 33) Pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

### **2.1.2 Konsep Pembangunan Manusia**

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyatnya untuk menikmati umur yang panjang, sehat serta dapat menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, *Human Development Report*, 1990). Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan. Artinya dalam melakukan pembangunan nasional manusia merupakan bagian yang paling mendapat perhatian. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan di masyarakat dapat diatasi. Permasalahan tersebut meliputi kemiskinan, gizi buruk dan buta huruf.

Peningkatan kemampuan dasar manusia adalah salah satu upaya untuk meningkatkan potensi bangsa, yang berdampak pada peningkatan kualitas manusia. Pendidikan dan kesehatan adalah modal yang harus dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan potensinya. Untuk itu dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dimulai dari perbaikan aspek-aspek tersebut.

Menurut UNDP, dalam pembangunan manusia ada 4 hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Produktivitas, dimana masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.
2. Pemerataan, dimana masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan ini.
3. Kestinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi dimasa depan. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi.
4. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

### **2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia**

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) tahun 1990. Lalu UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu IPM dipublikasikan dalam *Human Development Report* setiap tahunnya. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup yang layak (*decent standard of living*)

IPM merupakan salah satu indikator penting dalam melihat sisi lain pembangunan. Adapun beberapa manfaat IPM dengan antara lain:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Berdasarkan besaran Indeks Pembangunan Manusia, negara-negara di dunia dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang *rendah* (*low human development*) jika memiliki nilai 0 sampai 0,50.
2. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*) jika memiliki nilai 0,50 sampai 0,79.
3. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*) jika memiliki nilai 0,80 sampai 1.

Arsyad, (2010) mengatakan bahwa konsep IPM memberikan gambaran tentang apa yang seharusnya dipandang sebagai ukuran keberhasilan

pembangunan. Pembangunan berawal dan bertitik tolak dari manusia, dilakukan oleh manusia, dan sudah semestinya ditujukan kepada manusia.

## **2.1.4 Dimensi Indeks Pembangunan Manusia**

### **2.1.4.1 Umur Panjang dan Hidup Sehat**

Lanjouw, dalam Ginting (2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan dengan bukan penduduk miskin. Adanya fasilitas kesehatan yang murah dan terjangkau akan sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kesehatan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan juga pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian di Pasal 34 ayat 3 ditegaskan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Kesehatan merupakan modal yang penting dalam menciptakan peluang-peluang untuk mampu beraktivitas secara normal. Kondisi kesehatan yang baik dapat menjamin manusia dalam berbagai kegiatan pada kehidupan sehari-harinya.

#### **2.1.4.2 Indeks Pengetahuan**

Salah satu tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mendapatkan pengajaran, pendidikan, dan ilmu pengetahuan juga merupakan sebuah hak asasi manusia sesuai dengan yang tertulis pada UUD 1945 pasal 28C, pasal 28E, dan pasal 31.

Pendidikan memegang peranan penting sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, negara menyelenggarakan program wajib belajar untuk pendidikan dasar. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia, serta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

#### **2.1.4.3 Standar Hidup Layak**

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dinikmati sebagai dampak dari semakin meningkatnya perekonomian masyarakat. UNDP mengukur standar hidup layak dengan menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menggunakan

standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita rill yang disesuaikan.

### 2.1.5 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum perhitungan IPM, setiap komponen harus dihitung indeksinya.

#### 1. Dimensi Kesehatan

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

#### 2. Dimensi Pendidikan

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{HLS + RLS}{2}$$

$$HLS = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$RLS = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

**TABEL 2.1**

#### **PENENTUAN NILAI MAKSIMUM DAN MINIMUM**

Indikator	Satuan	Maksimum	Minimum
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	85	20
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	18	0
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	15	0
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan		26.572.352 (Rp)	1.007.436 (Rp)

**TABEL 2.2**  
**DIAGRAM PERHITUNGAN IPM**

<b>Dimensi</b>	<b>Umur Panjang dan Sehat</b>	<b>Pengetahuan</b>	<b>Standar Hidup Layak</b>
<b>INDIKATOR</b>	Angka Harapan Hidup ↓	Harapan Lama Sekolah & Rata-rata Lama Sekolah ↓	Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan ↓
<b>INDEKS</b>	Indeks Kesehatan	Indeks Pendidikan ↓	Indeks Pengeluaran
	Indeks Pembangunan Manusia		

Sumber : BPS 2014

Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa untuk menghitung IPM, terlebih dahulu harus dihitung Indeks Kesehatan, Indeks Pengetahuan, Indeks Pengeluaran. Selanjutnya nilai IPM dihitung sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Dimana:

$$I_{kesehatan} = \text{Indeks Kesehatan}$$

$$I_{pengetahuan} = \text{Indeks Pengetahuan}$$

$$I_{pengeluaran} = \text{Indeks Pengeluaran}$$

## 2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah semua pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah (Boediono 1993). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pemerintah berperan di dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa publik yang tak dapat disediakan sektor swasta. Menurut pendapat Keynes dalam Sadono Sukirno (2000) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan.

Pengeluaran pemerintah (*Government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000) yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu:

## 1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.

## 2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Menurut Dumairy (1999) dalam skripsi Brilian (2016) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

- a. Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- b. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar
- c. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.
- d. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Klasifikasi belanja publik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan klasifikasi belanja sebagai berikut:

1. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.
2. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
3. Klasifikasi Menurut Fungsi Terdiri Dari;
  - a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerial pemerintahan daerah
  - b. Klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja publik dapat dikategorikan berdasarkan berbagai macam kriteria, salah satu diuraikan dalam *Government Finance Statistics Manual* (1986) dalam skripsi Brilian (2016) adalah sebagai berikut:

#### 1. Belanja Jasa Publik Umum

Belanja-belanja yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah belanja operasi untuk organisasi eksekutif dan legislatif, belanja untuk jasa-jasa umum, belanja riset dasar, belanja transaksi hutang, dan belanja administrasi transfer antar unit pemerintah daerah.

## 2. Belanja Pertahanan

Belanja-belanja kategori ini antara lain adalah belanja pertahanan militer dan sipil, bantuan militer untuk asing, riset pertahanan dan sebagainya.

## 3. Belanja Perlindungan Umum

Belanja kategori ini dibedakan dengan belanja pertahanan, diantaranya adalah belanja jasa kepolisian, jasa pemadam kebakaran, jasa pengadilan, jasa rumah tahanan dan riset untuk perlindungan public.

## 4. Belanja Urusan Ekonomi

Belanja yang termasuk dalam kategori ini diantaranya belanja urusan ketenagakerjaan, belanja komersial, belanja energi dan bahan bakar dan belanja untuk perindustrian lainnya beserta risetnya.

## 5. Belanja Perlindungan Lingkungan

Belanja yang termasuk diantaranya adalah belanja pengolahan limbah dan polusi, serta tata kota.

## 6. Belanja Perumahan Dan *Public Utilities*

Belanja kategori ini diantaranya adalah pengembangan perumahan dan pemukiman, sistem penyediaan air bersih, belanja penerangan jalan, dan pekerjaan-pekerjaan umum lainnya.

## 7. Belanja Kesehatan

Belanja kesehatan diantaranya adalah perlengkapan dan peralatan kesehatan, jasa kepada pasien, jasa rumah sakit umum, dan risetnya

#### 8. Belanja Rekreasi, Budaya Dan Agama

Belanja ini antara lain adalah belanja jasa olahraga dan rekreasi, belanja jasa kebudayaan, jasa penyiaran, jasa urusan keagamaan,

#### 9. Belanja Pendidikan

Belanja pendidikan diantara lain adalah belanja pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, termasuk belanja pendukung pendidikan lainnya.

#### 10. Belanja Perlindungan Sosial

Belanja perlindungan sosial diantara lain adalah belanja perlindungan terhadap manusia lanjut usia (manula), belanja perlindungan anak dan keluarga, belanja untuk mengatasi pengangguran, dan belanja sosial lainnya.

### **2.2.1 Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan**

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah. Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan

masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini dipercaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat (Bastias) dalam skripsi (Nur Azizah 2016). Senada dengan itu menurut Sulaiman Asang (2012) Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*.

Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah. Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pasca tahun 1776, yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, dengan mengisolasi dua faktor, yaitu pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Menurut Todaro pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 6 cara yaitu:

1. Meningkatnya secara umum kualitas angkatan kerja melalui penanaman pengetahuan kerja dan keterampilan.

2. Meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan mempromosikan pembagian kerja.
3. Memungkinkannya penyerapan Informasi baru secara lebih cepat dan penerapan proses baru dan input yang kurang dikenal menjadi lebih efisien.
4. Menghilangkan hambatan hambatan sosial dan kelembagaan bagi pertumbuhan ekonomi.
5. Beraninya wirausahawan untuk mempromosikan tanggung jawab individual, kemampuan organisasional, mengambil resiko yang moderat dan merencanakan dalam jangka panjang.
6. Meningkatnya kemampuan manajemen menjadi lebih sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien.

Berdasarkan berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 tahun 2008 Pasal 1 ayat ke (3) Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan yang dianggarkan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

Anggaran pendidikan yang besar jika dikelola dengan baik dan dialokasikan secara tepat diharapkan mampu meningkatkan tingkat melek huruf dan tingkat lama sekolah. Dengan bertambahnya kapasitas seseorang akibat dari mengenyam pendidikan, maka diharapkan mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga mendapatkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya dengan tingkat pendapatan yang lebih baik, diharapkan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga dengan demikian akan meningkatkan angka harapan hidup.

Belanja pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1) tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan menjadi ukuran yang menunjukkan perhatian pada usaha pengembangan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan.

Pemerintah hendak menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah, sehingga diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Dalam pemenuhan

anggaran tersebut amanat amandemen UUD 1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total anggaran. Pendidikan dapat dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan, sehingga diperlukan peran pemerintah dengan pengalokasian belanja untuk peningkatan pembangunan melalui peningkatan pendidikan (Todaro, 2006).

### **2.2.2 Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan**

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan) dalam skripsi (Bambang Riski Syahputra 2016)

Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (1) menyebutkan besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji dan ayat (2) menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat diklasifikasikan dalam dua kategori utama yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan kebutuhan pokok.

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan.

Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas. Kesehatan dapat dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan

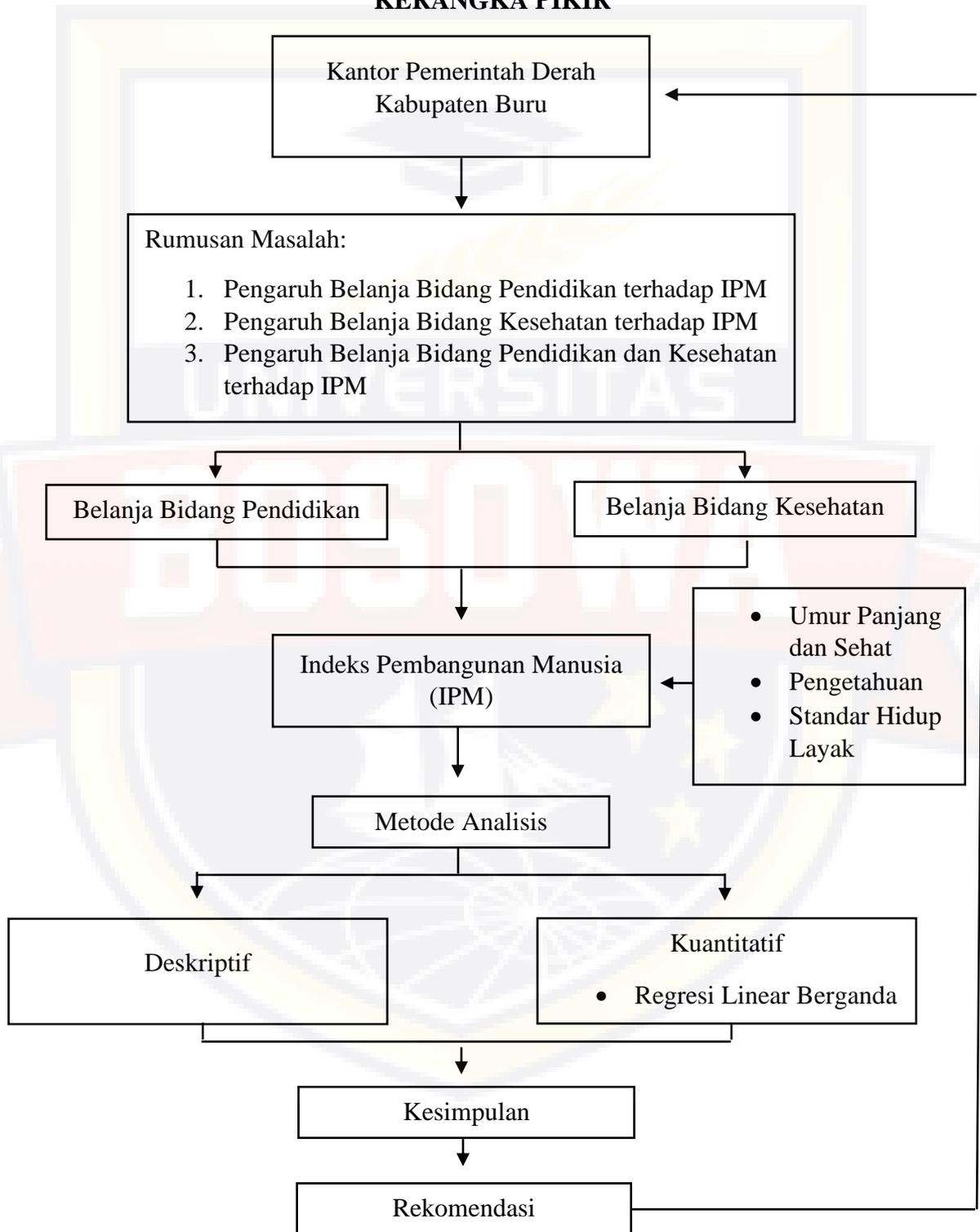
dan pembangunan, sehingga diperlukan peran pemerintah dengan pengalokasian belanja untuk peningkatan pembangunan melalui peningkatan kesehatan (Todaro 2006).



### 2.3 Kerangka Piikir

GAMBAR 2.1

KERANGKA PIKIR



## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dinyatakan jawaban sementara, karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan, dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dalam pengumpulan data.

Adapun hipotesis yang dikemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Di duga bahwa Belanja Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku tahun 2012-2021.
2. Di duga bahwa Belanja Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku tahun 2012-2021.
3. Di duga bahwa Belanja Bidang Pendidikan dan Belanja Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2012-2021.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru di Jl. Abdulah Solissa, Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. ini dilaksanakan selama  $\pm$  2 bulan, dari tanggal 02 Maret hingga 25 Mei

#### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data yang akurat dan relevan terkait dengan penelitian ini. Untuk melengkapi data dan referensi yang diperlukan dalam penyusunan proposal penelitian ini, maka ditempuh cara sebagai berikut:

##### **2.1.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Untuk mendapatkan data dilapangan penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

###### **1) Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah, dan dapat juga berbentuk file yang tersimpan disarver serta data yang tersimpan di wibesite. Metode ini dilakukan dengan mengambil data yang diperlukan guna mendukung penelitian tersebut.

### **2.1.2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data yang digunakan selain menggunakan dokumentasi juga menggunakan kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang didapatkan dari membandingkan dan mengkaji beberapa sumber, studi kepustakaan dari berbagai dokumen, buletin, artikel-artikel dan karya ilmiah (skripsi) yang berhubungan dengan penulisan ini untuk mendapatkan data sekunder. Dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

## **2.2 Jenis dan Sumber Data**

### **2.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel lainnya. dalam penelitian ini menganalisis pengaruh Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku baik secara simultan maupun parsial.

### 2.2.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dimana data yang dikumpulkan bersumber dari jurnal, laporan tahunan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

### 3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel. Penggunaan analisis deskriptif ini ditujukan untuk mengetahui Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia.

#### 3.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi ganda. Analisis regresi berganda, bertujuan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut :

$$\text{Ln}Y = \text{Ln} b_0 + b_1 \text{Ln} X_1 + b_2 \text{Ln} X_2 + e$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

B1 dan B2 = Koefisien Regresi

Bo = Bilangan Konstanta

X1 = Bidang Pendidikan

X2 = Bidang Kesehatan

e = Error Term (kesalahan pengganggu)

Data hasil penelitian akan diolah dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 25

#### a. Uji Asumsi Klasik

Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan hasil perbandingan  $t$  hitung dengan  $t$  table. Agar model regresi yang digunakan menunjukkan hubungan yang signifikan yang disebut BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) harus memenuhi asumsi dasar klasik regresi, meliputi:

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (sulyanto. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dilakukan dengan pengujian Kolmogrov-Smirnov.

Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

a. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka distribusi normal, dan

b. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka distribusi tidak normal

b. Uji Multikolinearitas

cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi multikolinearitas antara lain dengan metode VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas. Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*).

1. Tidak Terjadi Multikolonieritas, jika nilai VIF lebih kecil 5,00.
2. Terjadi Multikolonieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 5,00.

c. Heterokedastitas

Heterokedastitas adalah keadaan dimana factor pengganggu tidak memiliki varian yang sama (Winarno 2007). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengetahui masalah heteroskedastisitas adalah dengan uji white. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas.

Dari hasil uji White Heterisdastisitas kriteria untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastitas.

1. Bila Prob Obs\*R- square  $< 0,05$  = maka terdapat heteroskedastisitas (tolak  $H_0$ , terima  $H_a$ )
2. Bila Prob Obs\*R- square  $> 0,05$  = maka tidak terdapat heteroskedastisitas (tolak  $H_a$ , terima  $H_0$ )

#### d. Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila term of error ( $\mu$ ) dari periode waktu yang berbeda berkorelasi. Dikatakan bahwa term of error berkorelasi atau mengalami korelasi serial apabila variabel  $(e_i, e_j) \neq 0$  untuk  $1 \neq j$ , dalam hal ini dapat dikatakan memiliki masalah autokorelasi. Ada beberapa cara untuk mengetahui keberadaan autokorelasi, yaitu:

- a. Dengan memplot grafik
- b. Dengan Durbin-Watson (D-W test).

Dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \rho = 0$ , artinya tidak ada autokorelasi

$H_a : \rho \neq 0$ , artinya ada autokorelasi

Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu diperoleh nilai kritis  $d_l$  dan  $d_u$  dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai  $\alpha$ .

### 3.4.2 Uji Hipotesis

#### 1) Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik.

Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan uji berikut:

- 1) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak
- 2) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah :

- 1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (signifikan)
- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak signifikan)

## 2) Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia yang merupakan variable dependennya.

Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program spss sebagai berikut:

- 1) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima
- 2) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah :

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (signifikan)
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak signifikan)

### 3.5 Defenisi Operasional

1. Pembangunan ekonomi dikatakan sebagai sebuah proses kenaikan pada pendapatan total serta pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi ini mempertimbangkan pada penambahan penduduk pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi di suatu negara dan juga pada pemerataan pendapatan.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
3. Belanja Bidang Pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan.
4. Belanja Bidang Kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buru**

Kabupaten Buru merupakan salah satu bagian dari Provinsi Maluku yang dimekarkan sejak bulan Oktober Tahun 1999 dan mengalami pemekaran lagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2008. Dalam Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi (RSTRP) Maluku, Kabupaten Buru telah ditetapkan sebagai kawasan Prioritas, yakni Merupakan Kawasan Tumbuh Cepat berbasis pertanian. *Good Will* Pemerintah Provinsi Maluku ini didukung dengan potensi sumberdaya alam Kabupaten Buru yang cukup besar sehingga diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi wilayah ini.

Letak Kabupaten Buru sangat strategis dalam menjembatani provinsi-provinsi lain dengan provinsi Maluku dengan 3 (tiga) pintu keluar utama yakni Kota Namlea dengan akses Ke Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, Teluk Bara dengan akses ke Kepulauan Sula (Provinsi Maluku Utara), Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan serta Illath dengan akses ke Kabupaten Buru Selatan dan Kota Ambon

Dalam hubungannya dengan perkembangan kawasan yang lebih luas, Kabupaten Buru juga memiliki keuntungan sebagai titik strategis bagi pertemuan beberapa jalur pelayaran Internasional. Dengan dibukanya jalur Sea Line III

maka Kabupaten Buru berada dilokasi yang sangat strategis khususnya untuk dijadikan titik singgah bagi kapal-kapal internasional yang melalui jalur tersebut. Peluang ini dapat dimanfaatkan guna memasarkan hasil-hasil produksi yang ada di Kabupaten Buru serta menerima perkembangan teknologi dari luar. Dengan ditetapkannya Kabupaten Buru sebagai Lumbung Pangan Kawasan Timur Indonesia di Provinsi Maluku sangatlah beralasan untuk dijadikan stater poin dalam memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi di Maluku. Hal ini karena selain Kabupaten Buru memiliki potensi lahan yang cukup luas juga memiliki letak yang sangat strategis dalam menghubungkan provinsi maluku dengan wilayah-wilayah sekitarnya baik secara eksternal maupun internal.

Mensikapi kondisi ini maka sangatlah diharapkan untuk segera membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Diantara berbagai kebutuhan yang sangat urgen dalam meningkatkan dalam meningkatkan investasi adalah pembangunan Dermaga Namlea, sarana jalan yang menghubungkan Kota Kabupaten dan Kota Kecamatan maupun Desa.

Secara geografis, Kabupaten Buru memiliki luas wilayah 7.594,92 Km<sup>2</sup> secara astronomis, Kabupaten Buru terletak pada koordinat :

- Bujur Timur : 121021' - 125021' BT
- Lintang Selatan : 2025' - 3055' LS

Secara administratif Kabupaten Buru berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Laut Seram
- Sebelah Timur : Selat Manipa
- Sebelah Barat dan Selatan : Kabupaten Buru Selatan

Iklim yang berlaku di Kabupaten Buru yaitu low tropis dan iklim musim yang dipengaruhi oleh angin musim serta berhubungan erat dengan lautan yang mengelilinginya. Selain itu luas daratan yang berbeda-beda memungkinkan berlakunya iklim musim. Ciri umum dari curah hujan tahunan rata-rata sebagai berikut :

Buru bagian Utara (Namlea, Waplau, Air Buaya) : 1400 – 1800 mm/tahun

Buru bagian Tengah (Waeapo) : 1800 – 2000 mm/tahun

Pada kawasan berelevasi lebih dari 500 m dpl dengan rata-rata 3000 – 4000 mm/tahun berkaitan erat dengan perubahan ketinggian yang di mulai dari zona pesisir, yang selanjutnya dapat diikuti pada bagian berikut. Sedangkan kondisi suhu rata-rata 26o C.

#### **4.1.2. Gambaran Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru di Jl. Abdulah Solissa, Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik.

#### **4.1.3. Visi dan Misi Badan Pusat Statistik**

##### **4.1.3.1 Visi Badan Pusat Statistik**

“Penyedia data statistic berkualitas untuk Indonesia maju”

#### 4.1.3.2 Misi Badan Pusat Statistik

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

#### 4.1.4. Sejarah Bdan Pusat Statistik

Kegiatan statistic di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa pemerintah Hindia Belanda oleh suatu Lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan perdagangan (*Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel*) di bogor. Pada Februari 1920 lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistic. Pada 24 september 1924 kegiatan statistic pindah ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantoor Voor De Statistiek* (CKS) dan melaksanakan sensus penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa pemerintah jepangg di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama menjadi *Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu* dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin

oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya surat edaran kementerian kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C, Lembaga KAPPURI Dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri kemakmuran.

Berdasarkan keputusan Menteri perekonomian Nomor P/44, KPS bertanggung jawab kepada menteri perekonomian. Selanjutnya, melalui SK Menteri perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian yaitu Afdeling A (bagian Riset) dan Afdeling B (bagian penyelenggaraan dan tata usaha). Berdasarkan keppres X nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggung jawab langsung kepada perdana Menteri. Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut merupakan sensus penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh kantor gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya, sedangkan plehkantor Bupati/Kotamadya dilaksanakan oleh kantor Bupati/Walikota, sedangkan pada tingkat Kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan sensus penduduk. Selanjutnya penyelenggara sensus di kantor gubernur dan kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi kantor Sensus dan Statistik daerah berdasarkan keputusan Presidium Kbinet Nomor Aa/C/9 tahun 1965.

Berdasarkan peraturan pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang Organisasi dan Tatat kerja BPS di pusat dan daerah serta perubahannya menjadi PP no.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah kantor

Statistik Kabupaten atau kotamadya. Tentang Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No. 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 9 Januari 1992. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS diatur dengan keputusan presiden nomor 6 tahun 1992. Pada tanggal 19 Mei 1997 ditetapkan UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah nama menjadi Badan Pusat Statistik. Pada keputusan Presiden No.86 tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik di Indonesia.

#### **4.1.5 Tugas dan Fungsi Badan Pusat Statistik**

##### **4.1.5.1 Tugas Badan Pusat Statistik**

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan

##### **4.1.5.2 Fungsi Badan Pusat Statistik**

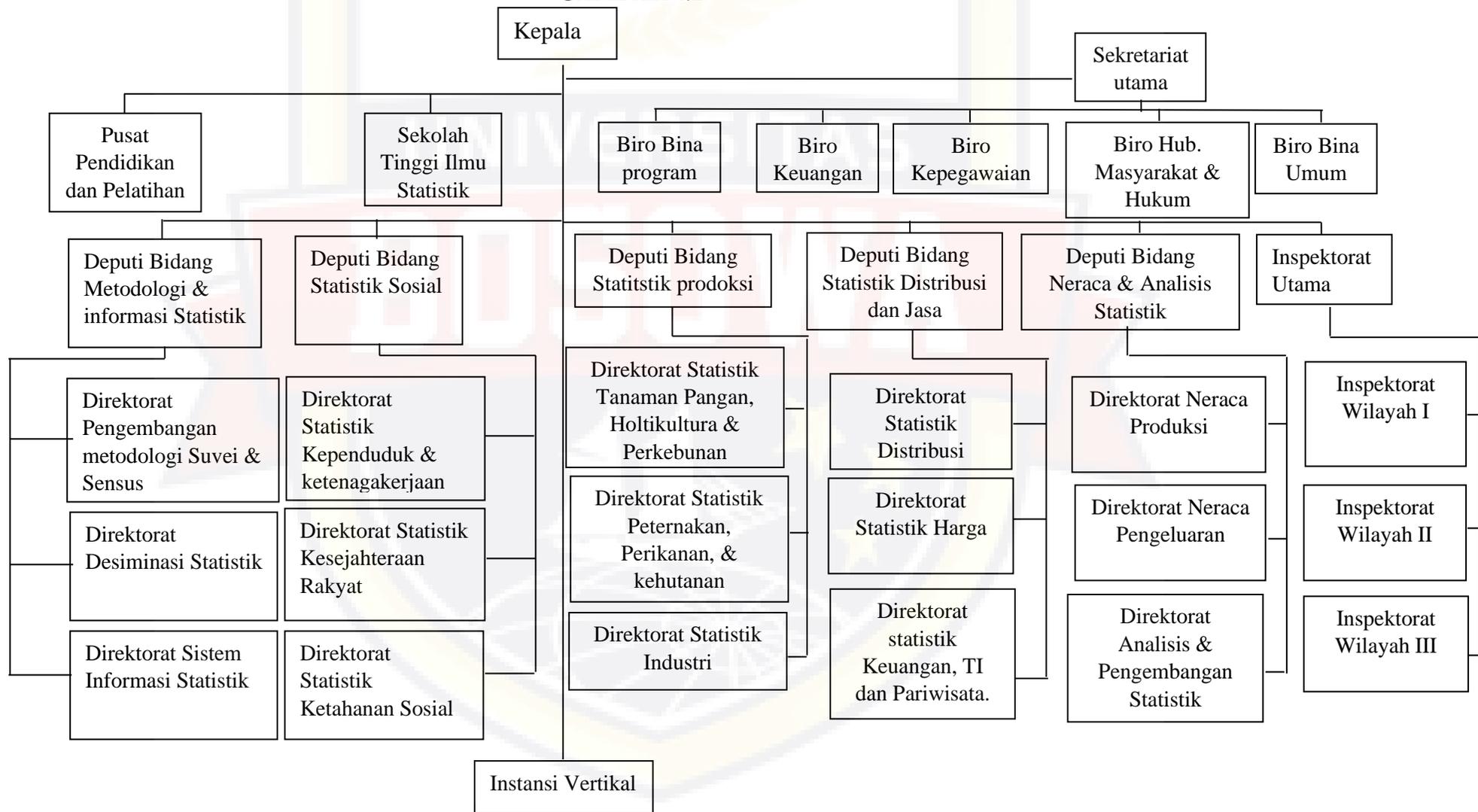
1. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistic.
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional.
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar.
4. Penetapan sistem statistik nasional.
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistic.
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.



#### 4.1.6 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik

GAMBAR 4.1



#### 4.1.7 Tugas Masing – Masing Bagian

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
4. Deputi Bidang Statistik Sosial;
5. Deputi Bidang Statistik Produksi;
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
8. Inspektorat Utama;
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
10. Instansi Vertikal

1. BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama
2. Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Sekretariat Utama terdiri dari beberapa Biro, setiap Biro terdiri dari beberapa Bagian dan setiap Bagian terdiri dari beberapa Subbagian.

Sekretariat Utama terdiri dari Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum.

3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Diseminasi Statistik, dan Direktorat Sistem Informasi Statistik.
4. Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri dari Direktorat Statistik Kependudukan & Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
5. Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Deputi Bidang Statistik Produksi terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Direktorat Peternakan, Perikanan & Kehutanan dan Direktorat Statistik Industri.
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi & Jasa terdiri dari Direktorat Statistik Harga, Direktorat Statistik Distribusi, dan Direktorat Statistik Keuangan, TI & Pariwisata.

7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca Pengeluaran, dan Direktorat Analisis & Pengembangan Statistik.
8. Inspektorat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS;
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.
10. Instansi Vertikal BPS terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

## 4.2. Deskriptif Data

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

**TABEL 4.1**  
**DATA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BURU**  
**PROVINSI MALUKU TAHUN 2012-2021**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (Y)	LnY
2012	63,50	4,15
2013	64,31	4,16
2014	65,15	4,18
2015	65,75	4,19
2016	66,63	4,20
2017	67,61	4,21
2018	68,25	4,22
2019	68,91	4,23
2020	68,95	4,23
2021	69,33	4,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun (2012-2021), Data Diolah SPSS

Pada tabel 4.1 diatas dapat di lihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 69,33 dan terendah pada tahun 2012 sebesar 63,50.

Belanja Bidang Pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota.

Belanja Bidang Kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota.

**TABEL 4.2**  
**DATA BELANJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KABUPATEN**  
**BURU PROVINSI MALUKU TAHUN 2012-2021**

Tahun	Bidang Pendidikan	(Ln $X_1$ )	Bidang Kesehatan	Ln $X_2$ )
2012	22.627.424.142	23,84	11.134.567.652	23,13
2013	26.430.241.413	24,00	7.325.011.257	22,71
2014	21.122.503.821	23,77	7.240.572.797	22,70
2015	32.603.424.408	24,21	11.010.579.408	23,12
2016	21.631.458.051	23,80	13.254.454.888	23,31
2017	20.025.940.377	23,72	52.352.953.350	24,68
2018	24.823.548.903	23,94	78.919.432.144	25,09
2019	30.722.247.491	24,15	43.331.433.758	24,49
2020	54.515.407.300	24,72	81.712.373.200	25,13
2021	95.072.422.479	25,28	82.270.871.093	25,13

Sumber: Bappeda Kabupaten Buru, Data diolah SPSS

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa Belanja Bidang Pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan Belanja Bidang Pendidikan tertinggi pada tahun 2021 senilai Rp. 95.072.422.479 sedangkan Belanja Bidang Pendidikan terendah pada tahun 2017 sebanyak Rp. 20.025.940.377.

Sedangkan Belanja Bidang Kesehatan juga mengalami peningkatan setiap tahun dan Belanja Bidang Kesehatan tertinggi pada tahun 2021 yaitu senilai Rp. 82.270.871.093 sedangkan Belanja Bidang Kesehatan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 7.240.572.797.

**TABEL 4.3**  
**DATA LN BELANJA BIDANG KESEHATAN, BELANJA BIDANG**  
**KESEHATAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI**  
**KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU**

Tahun	IPM (Y)	LnY	Bidang Pendidikan (X <sub>1</sub> )	(Ln X <sub>1</sub> )	Bidang Kesehatan (X <sub>2</sub> )	Ln X <sub>2</sub> )
2012	63,50	4,15	22.627.424.142	23,84	11.134.567.652	23,13
2013	64,31	4,16	26.430.241.413	24,00	7.325.011.257	22,71
2014	65,15	4,18	21.122.503.821	23,77	7.240.572.797	22,70
2015	65,75	4,19	32.603.424.408	24,21	11.010.579.408	23,12
2016	66,63	4,20	21.631.458.051	23,80	13.254.454.888	23,31
2017	67,61	4,21	20.025.940.377	23,72	52.352.953.350	24,68
2018	68,25	4,22	24.823.548.903	23,94	78.919.432.144	25,09
2019	68,91	4,23	30.722.247.491	24,15	43.331.433.758	24,49
2020	68,95	4,23	54.515.407.300	24,72	81.712.373.200	25,13
2021	69,33	4,24	95.072.422.479	25,28	82.270.871.093	25,13

Sumber : Data diolah SPSS Versi 25.0

### 4.3 Hasil Analisis Data

#### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan data variabel yang berhubungan permasalahan yang ada sebagai data pendukung dari hasil analisis kuantitatif. Variable yang dideskripsikan yaitu variable dependen dan independent berupa data nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi.

**TABEL 4.4**  
**HASIL STATISTIK DESKRIPTIF**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Bidang Pendidikan	10	23.72	25.28	24.1422	.49625
Bidang Kesehatan	10	22.70	25.13	23.9505	1.04152
Indeks Pembangunan Manusia	10	4.15	4.24	4.2018	.03136
Valid N (listwise)	10				

Sumber: data diolah, SPSS versi 25.0

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa n atau jumlah data disetiap variable yaitu 10. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Bidang Pendidikan sebagai variable  $X_1$  memiliki nilai minimum 23.72, nilai maksimum 25.28, nilai rata-rata 24.1422 dan standar deviasi yaitu 0.49625.
- b. Belanja Bidang Kesehatan sebagai variable  $X_2$  memiliki nilai minimum 22,70, nilai maksimum 25.13, nilai rata-rata 23.9505 dan standar deviasi yaitu 1.04152.
- c. Indeks Pembangunan Manusia sebagai Variabel Y atau variable dependen memiliki nilai minimum 4.15, nilai maksimum 4.24, nilai rata-rata 4.2018 dan standar deviasi yaitu 0.03136.

#### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

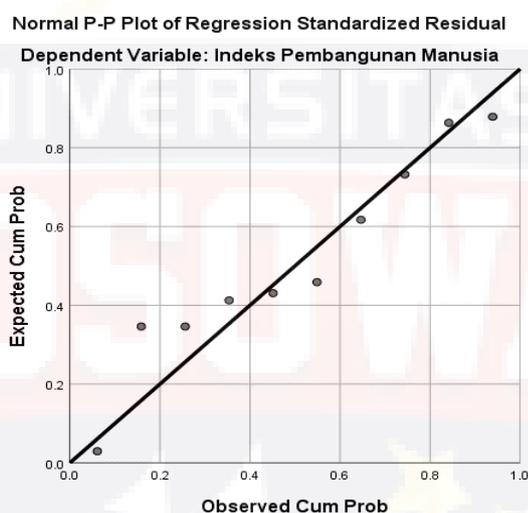
Sebelum menguji data dengan regresi linear berganda salah satu syarat yang harus terpenuhi yang melalui uji asumsi klasik agar hasilnya yang diperoleh dalam penelitian ini layak diolah ketahap selanjutnya.

#### 4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas menggunakan *Kolmogorof-Smirnof Test* dan melihat grafik P-P Plot, Pada grafik P-P Plot sebuah data dikatakan berdistribusi normal jika titik-titik menyebar disekitaran garis diagonal dan uji *Kolmogorof-Smirnof Test* dikatakan berdistribusi normal jika nilai Sig. > 0,05 sebaliknya jika nilai Sig. < 0,5 maka dikatakan tidak berdistribusi normal.

**GAMBAR 4.2**

#### **HASIL UJI NORMALITAS GRAFIK P-P PLOT REGRESI**



Sumber: Data diolah, SPSS Versi 25.0

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta menyesuaikan arah garis diagonal sehingga dapat dikatakan model regresi telah sesuai dengan asumsi normalitas.

**TABEL 4.5**  
**HASIL UJI NORMALITAS *KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST***

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal	Mean	.0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	.01303110
Most Extreme	Absolute	.227
Differences	Positive	.147
	Negative	-.227
Test Statistic		.227
Asymp. Sig. (2-tailed)		.156 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji normalitas berdasarkan uji statistic One Sample *Kolmogorov-Smirnov test* yang berarti lebih besar dari 0.05 yang artinya berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

#### **4.3.2.2 Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas yaitu dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10,00 dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi, sebaliknya jika nilai *Tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10,00 maka model regresi terjadi multikolinearitas.

**TABEL 4.6**  
**HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS**

Model		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized		Standardized			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.		
1	(Constant)	3.412	.241		14.185	.000		
	Bidang Pendidikan	.008	.012	.122	.651	.536	.703	1.422
	Bidang Kesehatan	.025	.006	.837	4.472	.003	.703	1.422

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: data diolah, SPSS versi 25.0

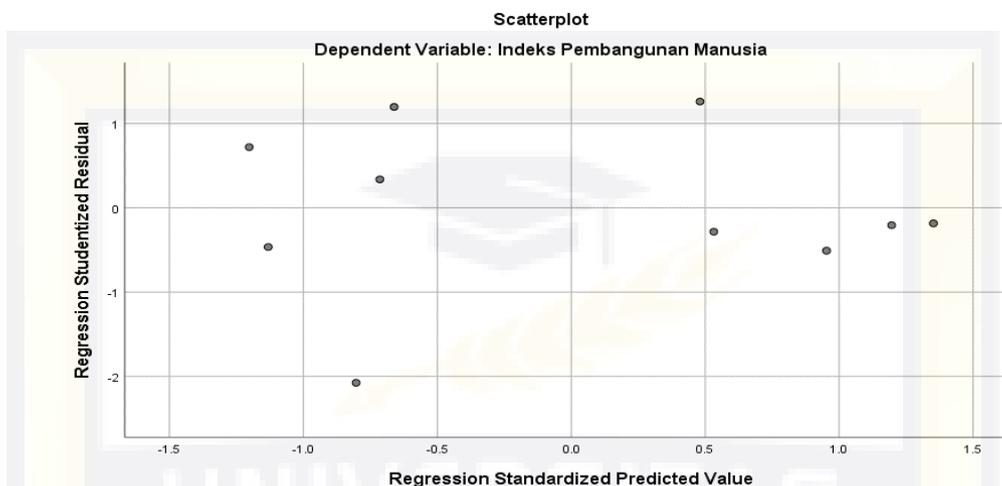
Berdasarkan table 4.6 dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* pada variabel  $X_1$  yaitu Belanja Bidang Pendidikan dan variabel  $X_2$  yaitu Belanja Bidang Kesehatan mempunyai nilai yang sama 0,703 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari kedua variabel independen tersebut yaitu  $1,422 < 10,00$ , sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas (*variable independent*).

#### 4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik, apabila dalam analisis grafik titik-titik menyebar dan tidak berbentuk pola yang jelas serta tersebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

GAMBAR 4.3

## HASIL SCATTERPLOT HETEROSKEDASTISITAS



Sumber: Data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 25.0

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dan tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dari hal tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi juga sering ditemukan pada sampel data *time series*. Adapun kriteria untuk pengambilan keputusan terjadinya autokorelasi dengan pengujian *Durbin Watson* yaitu:

- Jika jangka DW lebih kecil dari -2 ( $DW < -2$ ) berarti terjadi autokorelasi positif.
- Jika angka DW di antara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

- Jika angka DW lebih besar dari +2(DW > +2) berarti terjadi autokorelasi negative.

**TABEL 4.7****HASIL UJI AUTOKORELASI DURBIN-WATSON**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 <sup>a</sup>	.827	.778	.01478	1.429

a. Predictors: (Constant), Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan

b. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Pada tabel 4.7 menunjukkan nilai Durbin-Watson yaitu 1,429 maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi dikarenakan Durbin-Watson berada diantara nilai -2 dan +2.

**TABEL 4.8****HASIL UJI RUN TEST**

<b>Runs Test</b>	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.00206
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	6
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Sumber: Data diolah, SPSS Versi 25.0

Pada hasil pengujian autokorelasi dengan uji *run tests* tabel 4.7 menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 1,000 dimana nilai lebih besar dari 0,5 sehingga tidak terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu dengan periode sebelumnya oleh sebab itu pada penelitian ini tidak terjadi Autokorelasi.

#### **4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda**

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda dimana untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variable dependen, berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi semua memenuhi syarat dalam melakukan pengujian regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Bidang Pendidikan sebagai variable  $X_1$  dan Belanja Bidang Kesehatan sebagai variable  $X_2$  terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variable Y (variable dependen) periode tahun 2012-2021 di kabupateb Buru Provinsi Maluku.

**TABEL 4.9**  
**HASIL UJI REGERSI LINEAR BERGANDA**

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Toleranc e	VIF
1	(Constant)	3.412	.241		14.185	.000		
	Bidang Pendidikan	.008	.012	.122	.651	.536	.703	1.422
	Bidang Kesehatan	.025	.006	.837	4.472	.003	.703	1.422

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia  
Sumber: Data diolah, SPSS Versi 25.0

Dari analisis pada tabel 4.9 dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{LnY} = \text{Ln } b_0 + \text{Ln } X_1 + \text{Ln } X_2 + e$$

$$\text{LnY} = \text{Ln}3,412 + 0,008 \text{ Ln } X_1 + 0,025 \text{ Ln } X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas dijabarkan sebagai berikut:

- a. Variabel  $X_1$  yaitu Belanja Bidang Pendidikan bernilai positif sehingga setiap perubahan variabel independen akan berpotensi menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebagai variabel dependen. Variabel Belanja Bidang Pendidikan mengalami peningkatan 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) akan meningkat senilai 0,008% dengan asumsi Belanja Bidang Kesehatan adalah konstan.

- b. Variabel  $X_2$  yaitu Belanja Bidang Kesehatan bernilai positif sehingga setiap perubahan variabel independent akan berpotensi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebagai variabel dependen, apabila variabel Belanja Bidang Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat senilai 0,025% dengan asumsi Belanja Bidang Pendidikan bernilai konstan.

#### **4.3.4 Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri dari dua variabel independent dan satu variabel dependen. Pengujian ini memiliki tiga hipotesis yang sebelumnya telah dipaparkan dan menggunakan regresi linear berganda. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_1$  : Di duga bahwa Belanja Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Buru Provinsi Maluku tahun 2012-2021.

$H_2$  : Di duga bahwa Belanja Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Buru Provinsi Maluku tahun 2012-2021.

$H_3$  : Di duga bahwa Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Buru Provinsi Maluku 2012-2021.

#### 4.3.4.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai sig. < probabilitas 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap dependen atau dilihat dari t hitungnya.
- Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**TABEL 4.10**

#### HASIL UJI T PERSIAL

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Sig.	Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.412	.241	14.185	.000			
	Bidang Pendidikan	.008	.012	.122	.651	.536	.703	1.422
	Bidang Kesehatan	.025	.006	.837	4.472	.003	.703	1.422

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia  
Sumber: data diolah, SPSS Versi 25.0

Berdasarkan pada tabel 4.10 hasil uji dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = T_{\text{tabel}}(\alpha; (n-k))$$

Keterangan : k = jumlah variabel independen

n = jumlah sampel penelitian

$$= T_{\text{tabel}}(0,05 ; 10-3)$$

$$= T_{\text{tabel}}(0,05 ; 7)$$

$$= T_{\text{tabel}} 1,89458$$

1. Hasil uji hipotesis variabel Belanja Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) diperoleh nilai  $T_{\text{hitung}} = 0,651$  lebih kecil dari  $T_{\text{tabel}}$  yaitu 1,89458 maka dari itu nilai signifikan Belanja Bidang Pendidikan 0,536 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Belanja Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Hasil uji hipotesis variabel Belanja Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) diperoleh  $T_{\text{hitung}} = 4,472$  lebih besar dari  $T_{\text{tabel}}$  yaitu 1,89458 maka dari itu nilai signifikan Belanja Bidang Kesehatan 0,003 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia(Y).

#### 4.3.4.2 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara Bersama terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai  $\text{sig.} < 0,05$  maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  maka variabel independent berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

**TABEL 4.11**  
**HASIL UJI SIMULTAN**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.007	2	.004	16.772	.002 <sup>b</sup>
	Residual	.002	7	.000		
	Total	.009	9			

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

b. Predictors: (Constant), Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan

Sumber: Data dioleh, SPSS versi 25.0

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji simultan dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Rumus :  $F_{\text{tabel}} = F(k; n-k-1)$**

Keterangan : k = jumlah variabel independent

n = jumlah sampel penelitian

$$F_{\text{tabel}} = F(2 ; 10 - 2 - 1)$$

$$= F(2 ; 7)$$

$$= 4,73$$

Berdasarkan uji simultan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa uji  $F_{hitung}$  16,772 dan  $F_{tabel}$  sebesar 4,73, sehingga dapat di simpulkan bahwa  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  sehingga secara simultan Belanja Bidang Pendidikan dan Belanja Bidang Kesehatan (variabel independen) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (variabel dependen), dan nilai signifikannya 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan (variabel independent) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (variabel dependen).

#### 4.3.5 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur presentase sumbangan Belanja Bidang Pendidikan dan kesehatan (variabel independent) terhadap naik turunnya Indeks Pembangunan Manusia (variabel dependen). nilai koefisien determinasi biasa dikatakan baik jika nilai di atas 0,5 sebab nilai ini berkisaran antara 0 sampai 1.

**TABEL 4.12**

#### **HASIL UJI KOEFISIEN KORELASI DAN KOEFISIEN DETERMINASI**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 <sup>a</sup>	.827	.778	.01478	1.429

a. Predictors: (Constant), Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan

b. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: data diolah, SPSS Versi 25.0

Berdasarkan tabel 4.12 dapat di lihat nilai koefisien determinasi dari variabel Belanja Bidang Pendidikan dan Belanja Bidang Kesehatan (variabel

independen) dilihat pada *R Square* sebesar 0,778 atau dalam persen 77,8 sedangkan sisanya 23,2 dipengaruhi dalam oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian koefisien korelasi (*R*) sebesar 0,910 menunjukkan bahwa hubungan variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Belanja Bidang Pendidikan dan Belanja Bidang Kesehatan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **4.4 Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan peneliti, sehingga dapat menjelaskan secara spesifik pada pembahasan mengenai hasil uji hipotesis yaitu sebagai berikut:

##### **4.4.1 Pengaruh Belanja Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa Belanja Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru yang menunjukkan nilai  $T_{hitung} = 0,651$  lebih kecil dari  $T_{tabel}$  yaitu 1,89458 maka dari itu nilai signifikan Belanja Bidang Pendidikan 0,536 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku maka **Hipotesis pertama ditolak**. Diakibatkan Belanja Bidang

Pendidikan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk sektor Pendidikan terealisasi dengan baik hal ini terlihat karena lebih 20% dari total belanja daerah pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan. Hasil penelitian ini bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara Belanja Bidang Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia. Jika semakin besar Belanja Bidang Pendidikan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan jika Belanja Bidang Pendidikan menurun maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang di temukan oleh Febri Aquariansyah (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2016 dalam Persepektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung, dikarenakan pengeluaran pemerintah sebesar 20 persen tidak dialokasikan semuanya untuk Pendidikan tetapi juga dialokasikan untuk lainnya seperti gaji pegawai dan biaya Pendidikan lainnya. Sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung.

#### **4.4.2 Pengaruh Belanja Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara persial menunjukkan bahwa Belanja Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku yang menunjukkan  $T_{hitung} = 4,472$  lebih besar dari  $T_{tabel}$  yaitu 1,89458 maka dari itu nilai signifikan Belanja Bidang Kesehatan 0,003 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku maka **Hipotesis Kedua Diterima**. Belanja Bidang Kesehatan dampaknya dapat langsung diterima oleh masyarakat. Untuk menaikkan Angka Harapan Hidup pada masyarakat salah satu kebijakan pemerintah yakni dengan membuat Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS). Ketika sudah daftar masyarakat akan berobat ke rumah sakit dengan gratis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh King Clinton Naganegara (2018) dengan judul penelitian Analisis Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatra Utara tahun 2008-2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Bidang Kesehatan Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatra Utara.

#### **4.4.3 Pengaruh Belanja Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan uji simultan dapat di lihat bahwa uji  $F_{hitung}$  16,772 dan  $F_{tabel}$  sebesar 4,73, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  sehingga secara simultan Belanja Bidang Pendidikan dan Belanja Bidang Kesehatan (variabel independen) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (variabel dependen), dan nilai signifikannya 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga Belanja Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan (variabel independen) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (variabel dependen) Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

Hal ini sesuai dengan kejadian di lapangan bahwa setiap kenaikan anggaran belanja pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan di setiap tahunnya, maka meningkat pula tingkat indeks pembangunan manusia pada tahun 2010-2016. Sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap indeks pembangunan manusia

Hal ini juga sesuai dengan teori menurut Hera Susanti dkk bahwa pembangunan dibidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah diakui bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengeksploitasi berbagai sumber daya serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi pembangunan sosial. Dengan demikian, peningkatan pendidikan melalui pengeluaran pemerintah di suatu negara menjadi

sangat penting artinya bagi pembangunan negara tersebut. Menurut Todaro & Smith, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan maupun kesehatan guna perbaikan layanan dan fasilitas pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Belanja Bidang Pendidikan dan Belanja Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku pada periode 2012-2021. Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Bidang Pendidikan Berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
2. Belanja Bidang Kesehatan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
3. Belanja Bidang Pendidikan dan Belanja Bidang Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

#### **5.2 Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Provinsi Maluku dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya sebuah upaya yang dilakukan dalam

1. meningkatkan belanja daerah bidang pendidikan dan kesehatan melalui total belanja daerah khususnya pada Bidang Pendidikan bahwa dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk sektor Pendidikan terealisasi dengan baik hal ini terlihat karena lebih 20% dari total belanja daerah pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini di harapkan bisa di jadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya ataupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya 10 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya dan tahun penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

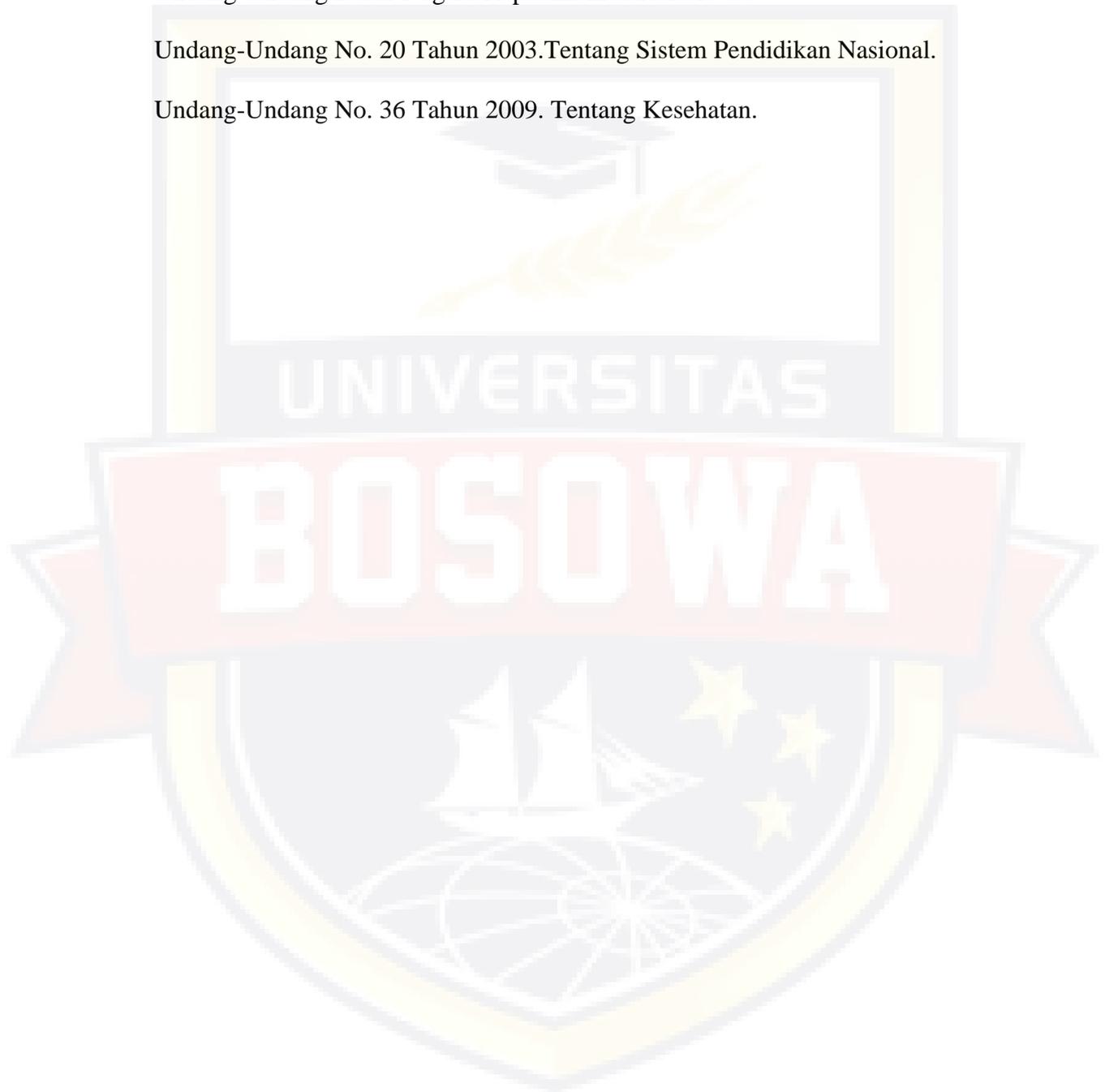
- Aditya, Aprida. 2016. *Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Azizah, Nur. 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanudin.
- BPS Kabupten Buru. *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota 2015-2012*. BPS Kabupaten Buru.
- BPS. *Sensus Penduduk*. 2010. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- BPS. 2014. *Indeks Pembangunan Manusia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 1996-2013*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2010-2017*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2009. Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Hera Susanti, Moh.Ikhsan dan Widyawati, 2012, *Indikator-indikator Makro Ekonomi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008. Tentang Wajib Belajar.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pratowo, Nur. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. *Jurnal Ekonomi*. Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.
- Rasyid.Brilian. 2016. *Pengaruh Belanja APBD Bidang Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Utara*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara.

UNDP. 2016. *Human Development Report 2016*. United Nations Development Programme.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan.





**Lampiran 1 : Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru 2012-2021**

IPM								
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
65,43	66,09	66,74	67,05	<b>67,60</b>	<b>68,19</b>	<b>68,87</b>	<b>69,45</b>	<b>69,49</b>
58,56	59,34	59,81	60,26	61,12	61,64	62,39	62,86	62,86
61,75	62,11	62,74	63,35	64,20	64,94	65,53	65,85	66,20
67,30	67,89	68,69	68,85	69,54	70,09	70,60	71,25	71,25
63,50	64,31	65,15	65,75	66,63	67,61	68,25	68,91	68,95
59,17	60,44	59,91	60,50	61,32	62,13	63,12	63,64	63,71
61,47	61,79	62,39	63,02	63,76	64,34	65,14	65,49	65,62
58,47	59,31	59,50	60,27	61,15	62,06	62,98	63,74	64,12
56,74	57,34	58,09	58,64	59,43	60,16	60,64	61,55	61,90
58,91	59,89	60,74	61,48	62,19	62,75	63,62	64,42	64,69
77,49	78,16	79,09	79,30	79,55	79,82	80,24	80,81	80,84
63,56	64,16	64,95	65,20	65,64	66,25	67,21	67,74	67,96

Pengeluaran per Kapita		IPM		Selisih IPM		Peringkat IPM	
2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8.732	8.770	69,49	69,71	0,04	0,22	26	26
6.297	6.335	62,86	62,97	0,00	0,11	10	10
7.545	7.580	66,20	66,33	0,35	0,13	5	5
10.210	10.243	71,25	71,32	0,00	0,07	2	2
10.316	10.347	68,95	69,33	0,04	0,38	3	3
7.586	7.625	63,71	63,83	0,07	0,12	9	9
8.690	8.720	65,62	65,83	0,13	0,21	6	6
9.453	9.480	64,12	64,30	0,38	0,18	8	8
6.890	6.918	61,90	62,37	0,35	0,47	11	11
7.566	7.600	64,69	64,80	0,27	0,11	7	7
14.116	14.148	80,84	81,23	0,03	0,39	1	1
7.351	7.405	67,96	68,16	0,22	0,20	4	4

**Lampiran 2 : Data Realisasi Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan**

Tahun	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan
2012	22.627.424.142	11.134.567.652
2013	26.430.241.413	7.325.011.257
2014	21.122.503.821	7.240.572.797
2015	32.603.424.408	11.010.579.408
2016	21.631.458.051	13.254.454.888
2017	20.025.940.377	52.352.953.350
2018	24.823.548.903	78.919.432.144
2019	30.722.247.491	43.331.433.758
2020	54.515.407.300	81.712.373.200
2021	95.072.422.479	82.270.871.093

**Lampiran 3: Tabel T**

**Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)**

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470

## Lampiran 4: Tabel F

Tabel Uji F

$\alpha =$ 0,05	$df_1 = (k-1)$							
	$df_2 = (n - k - 1)$	1	2	3	4	5	6	7
1	161,448	199,500	215,707	224,583	230,162	233,986	236,768	238,883
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072

## Lampiran 5: Hasil Analisis Data

## Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Bidang Pendidikan	10	23.72	25.28	24.1422	.49625
Bidang Kesehatan	10	22.70	25.13	23.9505	1.04152
Indeks Pembangunan Manusia	10	4.15	4.24	4.2018	.03136
Valid N (listwise)	10				

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.910 <sup>a</sup>	.827	.778	.01478	1.429

a. Predictors: (Constant), Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan

b. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.007	2	.004	16.772	.002 <sup>b</sup>
	Residual	.002	7	.000		
	Total	.009	9			

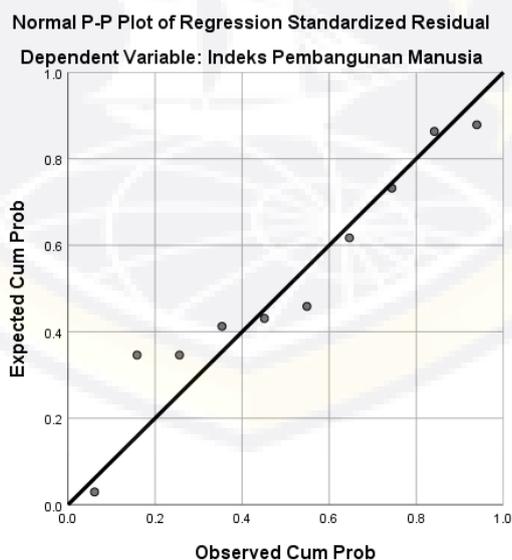
a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

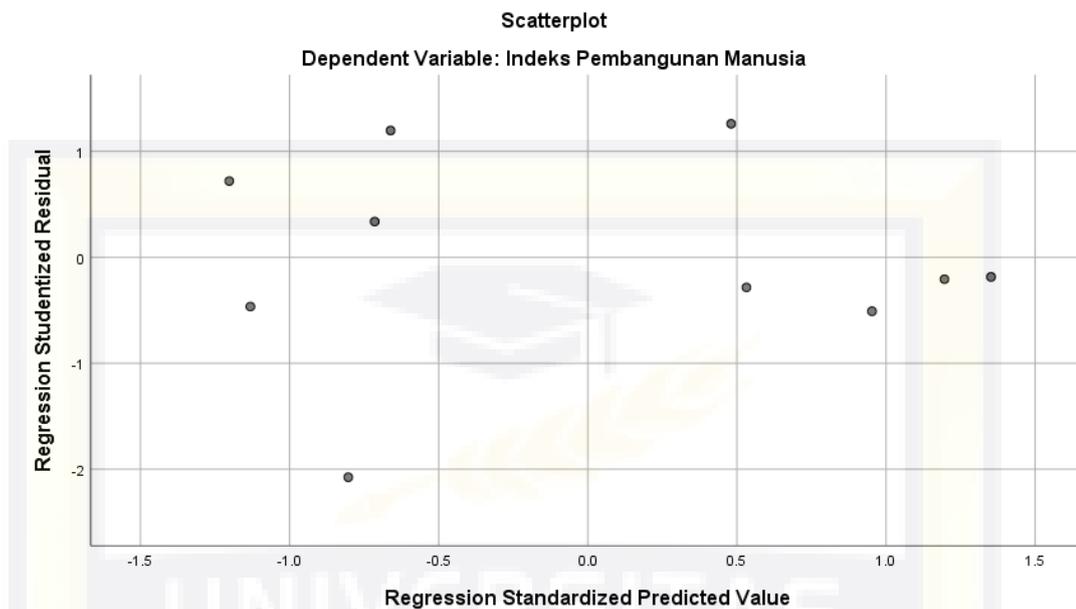
b. Predictors: (Constant), Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	d Coefficients			Beta	Tolerance
1	(Constant)	3.412	.241		14.185	.000		
	Bidang Pendidikan	.008	.012	.122	.651	.536	.703	1.422
	Bidang Kesehatan	.025	.006	.837	4.472	.003	.703	1.422

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia





### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01303110
Most Extreme Differences	Absolute	.227
	Positive	.147
	Negative	-.227
Test Statistic		.227
Asymp. Sig. (2-tailed)		.156 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.00206
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	6
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

**BOSOWA**

**Lampiran 6: Surat Izin Penelitian**

 **UNIVERSITAS BOSOWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568  
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A. 259 /FEB/UNIBOS/III/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth,  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Provinsi Maluku**  
Di, -  
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Yuni Syarifanti Banda  
NIM : 45 18 011 007  
Program Studi : Manajemen  
No. Tlp/HP : 082 196 628 632

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :  
**“Analisis belanja Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru provinsi Maluku”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 21 Maret 2022  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
  
Dr. H. A. Arifuddin Mane. SE., SH., M.Si., MH.  
NIDN. 09 0707 7003

Tembusan :  
1. Rektor Universitas Bosowa  
2. Arsip



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BURU**

**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

Nomor : B-053/81041/HM.200/05/2022  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Persetujuan Permohonan Ijin Melakukan  
Penelitian

Namlea, 11 Mei 2022

Yth.

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Bosowa**

di

Namlea

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Nomor A.259/FEB/UNIBOS/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Hal Permohonan Ijin Melakukan Penelitian Mahasiswa a.n. Yuni Syarifanti Banda (NIM 45 18 011 00), Program Studi Manajemen dengan Judul "Analisis Belanja Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buru Provinsi Maluku", maka dengan ini diberitahukan bahwa BPS Kabupaten Buru menerima/menyetujui permohonan ijin melakukan penelitian tersebut.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Bh. Kepala BPS Kabupaten Buru,

**Firman Syah Asegaff, SE**

**Lampiran 7: Pengambilan data di BPS kabupaten Buru**



**Lampiran 8: Pengambilan Data di Bappeda Kabupaten Buru**

